
**MENGAPA INOVASI DIBUTUHKAN DALAM PENENTUAN PRIORITAS
KEBIJAKAN ANGGARAN DESA****Shadu Satwika Wijaya***

Jurusan Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman

Email: shadu.satwika@unsoed.ac.id***Penulis Korespondensi**

ABSTRAK

Proses penganggaran pada suatu desa memiliki peran penting dalam keseluruhan siklus keuangan desa. Demokratisasi menuntut adanya transparansi tentang penggunaan/ pemanfaatan dana transfer desa, maka penelitian tentang penganggaran publik menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, bahwa kinerja penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa telah diselenggarakan dengan cukup optimal baik dari sisi proses perencanaan, implementasi dan kemanfaatan anggaran. Namun demikian, baiknya kinerja penganggaran ini belum diimbangi dengan upaya pemetaan prioritas kebutuhan pelayanan dasar masyarakat desa, sehingga masih dijumpai kondisi yang belum selaras antara prioritas dan alokasi anggaran terhadap preferensi kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. Untuk itu, teori relasi aktor dalam suatu kebijakan publik digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif di mana lokasi penelitian berada di 24 Desa di Kabupaten Cilacap, yang dipilih secara purposive. Sasaran dari penelitian ini adalah stakeholders dalam formulasi kebijakan penganggaran di tingkat Desa. Pengumpulan data dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat adanya mising link antara kebutuhan masyarakat desa dengan program kegiatan yang dimuat dalam Anggaran Pemerintah Desa (APBDes). Setelah dilakukan penjarangan aspirasi, terjadi pembahasan yang terbatas di tataran elite pemerintahan desa.

Kata Kunci: Otonomi Desa, Model Elit, Aktor Kebijakan, Penganggaran Publik, Pembangunan Perdesaan.

WHY INNOVATION IS NEEDED IN PRIORITIZING VILLAGE BUDGET POLICIES**ABSTRACT**

A village's budgeting process is crucial to the village's overall financial cycle. Research on public budgeting is urgently needed because democratization necessitates transparency regarding the utilization of village transfer funds. According to the findings of previous research, the village government's budgeting performance has been quite optimal in terms of the planning, implementation, and budget utilization processes. There are still conditions that are not yet aligned between priorities and budget allocations to preferences for basic service needs for the community. However, the good performance of this budgeting has not been matched by efforts to prioritize the basic service needs of rural communities. This study analyzes the data using the theory of actor relations in public policy as a result. The research was done using a qualitative method, and the locations of the study were 24 randomly selected villages in the Cilacap Regency. Stakeholders in the development of village-level budgeting policies are the focus of this study. Focus Group Discussion (FGD) was used to gather data. According to the findings of this study, there is a disconnect between the activities program included in the Village Government Budget (APBDes) and the requirements of the village community. At the village government elite level, there was little discussion following the aspirations screening.

Keywords: Local Autonomy, Mass Elite Model Policy Actor Public Budgeting, Rural Development

PENDAHULUAN

Ada kesadaran yang meningkat bahwa kebijakan publik tidak dikatakan berhasil atau gagal karena kemampuannya sendiri. Dalam suatu sistem yang kompleks dan cenderung rumit, akan amat sulit untuk menemukan cara terbaik untuk memastikan rancangan dan implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif. Namun, pemerintah daerah mulai menaruh perhatian yang lebih besar pada upaya di mana proses kebijakan, utamanya proses implementasi dapat diperkuat dan didukung untuk memastikan efektivitas dari suatu kebijakan. Salah satu upaya dalam memperkuat implementasi suatu kebijakan publik adalah dengan memastikan anggaran yang dialokasikan mampu mendukung efektivitas suatu kebijakan (Molenaers, 2012; Molenaers et al., 2010; Wolff, 2015).

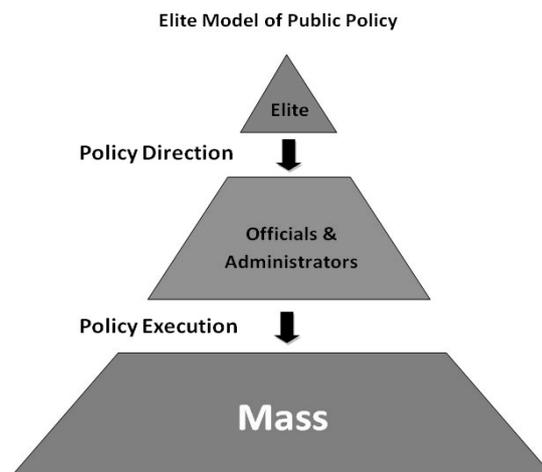
Penganggaran merupakan salah satu elemen yang utama dalam penentuan arah dan kebijakan organisasi, khususnya pada sektor publik ataupun pemerintahan desa (Ibrahim, 2019; Sharma & Frost, 2020). Melalui penganggaran pemerintah desa memiliki pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Selain itu penganggaran juga memiliki fungsi pengambilan keputusan terkait dengan banyaknya kebutuhan dan keinginan masyarakat. Tidak semua kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat diakomodir dalam anggaran, oleh sebab itu penganggaran juga merupakan alat politik yang berfungsi menentukan prioritas anggaran (Barker, 2019; Kurniasih et al., 2020; Malgwi & Unegbu, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mayoritas pengalokasian dana desa digunakan untuk pembangunan perdesaan dengan karakteristik fisik dan prasarana wilayah desa seperti dan pengadaan barang (Thomas, 2013). Hal ini membuat kurangnya efektivitas peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui dana desa. Padahal melalui instrumen desentralisasi fiskal seperti dana desa semestinya dapat mendorong dan mengakselerasi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang makin efektif, meningkatkan partisipasi publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat lokal (Daud & Soleman, 2020; Ding et al., 2019; Kusuma & Badrudin, 2016; Slavinskaite et al., 2020; Stojic & Tolic, 2019). APBDes yang merupakan instrumen fiskal belum sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat desa. Artikel ini bertujuan untuk menemukan sebab mengapa terjadi *missing link* antara kebutuhan masyarakat desa dengan program kegiatan yang dimuat dalam APBDes.

Kebijakan publik merupakan suatu hubungan interaksi di antara satu unit pemerintah dengan lingkungannya (Smith & Larimer, 2018; Stout, 2011). Sementara itu, kebijakan publik juga dimaknai sebagai rangkaian orientasi suatu tindakan-tindakan yang dilakukan aktor publik untuk menjawab dan mengatasi suatu masalah atau problema publik (Anderson, 2011). Untuk itu, secara umum kebijakan publik dapat dimaknai sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor kebijakan atau aktor publik dalam menjawab dan mengatasi masalah publik atau problema masyarakat. Semenara itu, kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) adalah aksi pemerintah yang memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan masyarakat (Blau, 2010; Messinger, 2006;

Rochefort, 2019; Tropman et al., 1983). Kebijakan publik disusun dan diformulasikan oleh *stakeholders*, yang secara konseptual di sebut sebagai aktor kebijakan. Aktor kebijakan adalah unsur kelembagaan atau komponen masyarakat yang memiliki posisi intern dan ekstern dari suatu sistem kebijakan, yang berperan aktif menyusun, terlibat dan terdampak dari suatu kebijakan publik (Knoepfel et al., 2018). Dengan kata lain, semua unsur yang terlibat dalam suatu kebijakan dapat dikatakan sebagai aktor kebijakan.

Untuk mengidentifikasi elemen *stakeholders* yang merupakan bagian dari aktor kebijakan, maka Knoepfel et al. (2018) mengelompokkan ke dalam tiga kategori aktor kebijakan dalam suatu proses kebijakan. Pengelompokan ini secara konseptual dikenal sebagai *the triangle of actors*. *The triangle of actors* terdiri atas 3 kelompok besar yaitu (1) *Policy Arena*, (2) *Public Actors* dan (3) *Affected Actors*. *Policy Arena*, adalah setiap unsur penyusun kebijakan yang secara langsung dan resmi terlibat dalam setiap proses kebijakan publik dari unsur pemerintah atau birokrat dan unsur politik atau pejabat politik. Sementara *Public Actors*, adalah setiap unsur yang langsung terlibat secara tidak langsung dalam proses kebijakan publik, tetapi pengaruh dan legitimasinya sebagai representasi publik amat diperhitungkan dan dibutuhkan dalam hal ini dari unsur akademisi, organisasi sosial dan organisasi masyarakat, serta bentuk-bentuk lain dari *non government organization*. Di samping itu, dikenal pula golongan *Affected Actors* yang merupakan setiap unsur yang memiliki posisi sebagai agen penerima kebijakan atau *target group* yang merupakan unsur kelompok sasaran kebijakan publik.



Gambar 1. Model Elit dalam Kebijakan Publik (Stewart & Lester (2008))

Kebijakan yang dibuat oleh aktor publik yang dalam proses penerapannya tidak selalu dapat efektif mengatasi problema atau permasalahan kebijakan. Hal ini terjadi akibat adanya *Bounded Rationality* (Rubinstein, 2020; Secchi, 2010; Simon, 1997) di mana dalam teori ini disebutkan bahwa rasionalitas pembuat kebijakan mungkin saja terbatas atau pembuat kebijakan cenderung memiliki keterbatasan dalam mengendalikan serapan

perkembangan informasi dan keterbatasan dalam mengendalikan pemahaman tentang suatu permasalahan kebijakan sehingga keputusan kebijakan yang dibuat oleh aktor kebijakan seringkali tidak sempurna. Dengan demikian, sangat memungkinkan adanya perubahan yang disebabkan oleh faktor ketidaksempurnaan suatu kebijakan itu sendiri yang dibuat di masa lalu, di mana itu terjadi karena keterbatasan rasionalitas dari aktor-aktor pembuat kebijakan. Oleh karenanya, diperlukan seangkaian langkah dalam memperbaiki dan melengkapi kebijakan terdahulu dengan perubahan-perubahan yang diperlukan. Perbaikan tersebut meliputi proses melengkapi kekurangan/ kelemahan dan mempertahankan yang dianggap telah sesuai, proses ini secara konseptuan disebut sebagai *incremental approach* dalam suatu proses kebijakan publik. Konsep inkremental ini memfokuskan pada transformasi yang mengutamakan komitmen keberlanjutan dari kebijakan sebelumnya (Lindblom, 1959, 2018).

Meskipun demikian, suatu kebijakan publik tidak terus-menerus berubah dengan komitmen keberlanjutan kebijakan sebelumnya (inkremental), kebijakan publik juga dapat bertransformasi secara radikal dan drastis dalam kurun waktu yang singkat. Kondisi ini secara konseptual dikenal sebagai *Punctuated Equilibrium* (Weible et al., 2018). Model ini beranggapan bahwa kebijakan publik tidak akan mampu mempertahankan kondisi monopolinya atau keseimbangan politis dari sebuah kebijakan (*policy monopoly*) tidak mampu bertahan pada keadaan stabil untuk waktu yang relatif panjang. Hal ini disebabkan, adanya kondisi tertentu yang membuat *dramatical change* pada suatu kebijakan publik (terbukanya *issue network*).

Untuk menggambarkan proses kebijakan publik, Lester & Stewart (2008) mencatat terdapat model kebijakan publik elitis ada teori pluralis. Model elitis menekankan bahwa kebijakan akan selalu berfokus pada elit politik sebagai tumpuan utama, sementara itu model pluralis menekankan pada peran elemen-elemen yang ada dalam suatu sistem demokrasi. Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab mengapa inovasi dibutuhkan dalam memprioritaskan kebijakan anggaran desa.

METODE

Penelitian dilakukan dengan perpaduan pendekatan kualitatif (Creswell, 2013). Lokasi penelitian berada di 24 Desa sampel yang mewakili 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap, yang dipilih secara *purposive*. Sasaran dari penelitian ini adalah *stakeholders* dalam formulasi kebijakan penganggaran di tingkat Desa. Pengumpulan data dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD). Informan dalam penelitian ini terdiri dari Aparatur Pemerintahan Desa, Lembaga – Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat dan Agama, *Non Government Organization* (NGO) dan organisasi lain yang terlibat dalam penyusunan kebijakan Penganggaran Desa Kabupaten Cilacap yang dipilih secara *purposive sampling*.

Teknik analisis data disesuaikan dengan tujuan-tujuan dalam penelitian (Bryman, 2008) Untuk itu, digunakan analisis data kualitatif *interactive analysis model* (Miles et al., 2014; Williamson et al., 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini telah menunjukkan adanya *missing link* antara kebutuhan masyarakat desa dengan program kegiatan yang dimuat dalam APBDes. Hal ini terjadi karena proses pembahasan dan penentuan skala prioritas hanya dibahas oleh Pemerintah Desa dan BPD. Artinya setelah melewati tahapan musyawarah dusun, maka proses selanjutnya sudah masuk domain Pemerintah Desa dan BPD atau dalam hal ini *elite* Pemerintahan Desa. kebijakan publik dimaknai sebagai hubungan interkasi antara pemerintah dengan lingkungannya (Smith & Larimer, 2018; Stout, 2011). Dengan melihat fenomena tersebut, maka sesungguhnya kebijakan penganggaran desa merupakan betruk dari hubungan pemerintah desa dengan lingkungannya yaitu masyarakat desa itu sendiri dalam upaya mengatasi permasalahan pokok masyarakat desa. Karena, kebijakan publik sejatinya adalah rangkaian upaya dan tindakan aktor kebijakan untuk menjawab dan mengatasi masalah atau persoalan publik (Anderson, 2011). Namun, fakta telah menunjukkan bahwa proses pembahasan dan penentuan skala prioritas hanya dibahas terbatas oleh elite Pemerintahan Desa.

Kebijakan publik disusun oleh *stakeholders*, yang secara konseptual disebut sebagai aktor kebijakan. Aktor kebijakan sebagaimana diungkapkan oleh Knoepfel et al. (2018) dimaknai sebagai pihak-pihak intern dan ekstern dari suatu sistem kebijakan, yang membuat, terlibat dan terdampak dari suatu kebijakan. Berdasarkan definisi Knoepfel et al. (2018) tentang *the triangle of actors*, maka yang tergolong sebagai berikut:

1. *Policy Arena* meliputi: Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena mereka yang langsung terlibat secara resmi/ formil dalam tiap proses kebijakan penganggaran desa;
2. *Public Actors* meliputi: tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta akademisi, di mana mereka terlibat secara tidak langsung dalam proses kebijakan, namun pengaruhnya sebagai representasi publik amat diperhitungkan dalam kebijakan penganggaran desa;
3. *Affected Actors* meliputi: masyarakat desa itu sendiri yang merupakan target group atau kelompok sasaran dari kebijakan penganggaran desa.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, bahwa dalam proses pembahasan dan penentuan skala prioritas hanya dibahas oleh Pemerintah Desa dan BPD. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kapasitas peranan dari ketiga komponen utama *Policy Actors*. Pihak yang tergolong dalam *Policy Arena* lebih mendominasi jalannya pembahasan dan penentuan skala prioritas penganggaran desa. Sementara itu, *Public*

Actors dan *Affected Actors* tidak dilibatkan secara langsung dalam pembahasan dan penentuan skala prioritas penganggaran desa. *Public Actors* dan *Affected Actors* dimintai pertimbangannya hanya sampai dengan tahapan penjaringan aspirasi masyarakat.

Kebijakan yang dibuat oleh aktor publik tidak selalu efektif mengatasi masalah publik. Hal ini erat kaitannya dengan *Bounded Rationality* (Kelly, 2004; Rubinstein, 2020; Secchi, 2010; Velupillai, 2017), dalam teori ini dijelaskan keterbatasan rasionalitas tiap-tiap manusia dalam mengendalikan informasi dan memahami permasalahan sosial, akibatnya keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak dapat sempurna (Bazerman & Moore, 2013). Oleh karena itu, perubahan kebijakan merupakan suatu keniscayaan, yang dikarenakan faktor ketidaksempurnaan kebijakan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini terlihat bahwa dominasi unsur pemerintahan desa memungkinkan terjadinya *Bounded Rationality*. Artinya, ketidaksempurnaan pembahasan dan penentuan skala prioritas kebijakan penganggaran merupakan akibat dari keterbatasan kemampuan para pihak pembuatnya atau *Policy Arena* dalam menyerap informasi dan memahami permasalahan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, jika ditinjau dari model elit-masa dalam kebijakan publik. Maka terlihat bahwa terjadi dominasi unsur Elit pada Pemerintah Desa pembahasan dan penentuan skala prioritas penganggaran desa. Masyarakat desa dapat memberikan usulan program dan aspirasi, namun penentuan prioritas dan keputusan akhir ada pada unsur Elit pada Pemerintah Desa. Model elitis menjelaskan bahwa kebijakan senantiasa bertumpu pada elit politik, sedangkan model pluralis bertumpu pada peran subsistem-subsistem yang berada dalam sistem demokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan politis dari suatu kebijakan atau dikenal sebagai konsep *policy monopoly* (Fraussen & Halpin, 2018; Weible et al., 2018). Di mana jejaring kebijakan belum mampu dibuka lebih luas kepada segenap *stakeholders* (Cairney, 2019; Fyall & McGuire, 2015; Green-Pedersen & Mortensen, 2012; Hadden, 2018; Klijn & Koppenjan, 2015).

SIMPULAN

Hasil penelitian telah berhasil mengungkapkan adanya *missing link* antara kebutuhan masyarakat desa dengan program kegiatan yang dimuat dalam APBDes. Hal ini terjadi karena proses pengambilan keputusan dan penentuan skala prioritas penganggaran desa dilakukan secara elitis, di mana terjadi ketidakseimbangan kapasitas peranan dari *policy actors*, di mana unsur *policy arena* lebih mendominasi jalannya proses pengambilan keputusan dan penentuan skala prioritas penganggaran desa. Dengan demikian inovasi amat dibutuhkan dalam upaya memprioritaskan kebijakan anggaran desa. Melalui inovasi diharapkan *missing link* antara kebutuhan masyarakat desa dengan program kegiatan yang dimuat dalam APBDes dapat diatasi. Melalui inovasi pengambilan keputusan dan penentuan skala prioritas penganggaran desa dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan kapasitas peranan di antara segenap unsur dalam *policy actors*, sehingga

tidak lagi dijumpai dominasi salah satu unsur *policy arena* dalam jalannya proses pengambilan keputusan dan penentuan skala prioritas penganggaran desa.

REFERENSI

- Anderson, J. E. (2011). Public Policymaking, 7th edition. In *Media*.
- Barker, L. (2019). *Definition of Development Planning*. Publication Career Trend.
- Bazerman, M. H., & Moore, D. H. (2013). Introduction to Managerial Decision Making. *Judgment in Managerial Decision Making*, 1–10.
- Blau, J. (2010). The dynamics of social welfare policy. In *The dynamics of social welfare policy (3rd ed.)*. https://www.lib.uwo.ca/cgi-bin/ezpauthn.cgi?url=http://search.proquest.com/docview/622119059?accountid=15115%0Ahttp://vr2pk9sx9w.search.serialssolutions.com?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rft_id=info:sid/PsycINFO&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:k
- Bryman, A. (2008). *Social Research Method*, 3rd Ed. Oxford: Oxford University Press.
- Cairney, P. (2019). Understanding Public Policy. In *Understanding Public Policy*. Bloomsbury Publishing. https://doi.org/10.1007/978-0-230-35699-3_10
- Daud, N., & Soleman, R. (2020). Effects of fiscal decentralization on economic growth and human development index in the Indonesian local governments. *Management Science Letters*, 10(16). <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.7.012>
- Ding, Y., McQuoid, A., & Karayalcin, C. (2019). Fiscal decentralization, fiscal reform, and economic growth in china. *China Economic Review*, 53, 152–167. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2018.08.005>
- Fraussen, B., & Halpin, D. (2018). How do interest groups legitimate their policy advocacy? Reconsidering linkage and internal democracy in times of digital disruption. *Public Administration*, 96(1), 23–35. <https://doi.org/10.1111/padm.12364>
- Fyall, R., & McGuire, M. (2015). Advocating for Policy Change in Nonprofit Coalitions. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 44(6), 1274–1291. <https://doi.org/10.1177/0899764014558931>
- Green-Pedersen, C., & Mortensen, P. B. (2012). Policy agenda-setting studies. Attention, politics and the public. In *Routledge Handbook of Public Policy* (pp. 167–174). <https://doi.org/doi:10.4324/9780203097571>
- Hadden, J. (2018). The Relational Sources of Advocacy Strategies: Comparative Evidence from the European and U.S. Climate Change Sectors. *Policy Studies Journal*, 46(2), 248–268. <https://doi.org/10.1111/psj.12217>
- Ibrahim, M. (2019). Designing zero-based budgeting for public organizations. *Problems and Perspectives in Management*, 17(2). [https://doi.org/10.21511/ppm.17\(2\).2019.25](https://doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.25)
- Kelly, T. (2004). Unlocking the Iron Cage: Public Administration in the Deliberative Democratic Theory of Jürgen Habermas. *Administration and Society*, 36(1), 38–61.

- <https://doi.org/10.1177/0095399703257268>
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2015). Governance networks in the public sector. In *Governance Networks in the Public Sector*. <https://doi.org/10.4324/9781315887098>
- Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F., & Hill, M. (2018). Public policy analysis. In *Public Policy Analysis*. Bristol University Press. <https://doi.org/10.2307/3324749>
- Kurniasih, D., Simin, & Wijaya, S. S. (2020). Rural Budgeting Organization in Indonesia. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 7(10). <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v7i010.02>
- Kusuma, M. W., & Badrudin, R. (2016). Fiscal decentralization effect on economic growth in Bali. *Economic Journal of Emerging Markets*, 8(2). <https://doi.org/10.20885/ejem.vol8.iss2.art6>
- Lindblom, C. E. (1959). Science of Muddling Through. *Public Administration Review*, 19.
- Lindblom, C. E. (2018). The science of "muddling through." In *Performance Based Budgeting* (pp. 39–55). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780429498411>
- Malgwi, A. A. ., & Unegbu, A. O. (2012). Budget in Nigerian Public Sector: Need for Balanced Scorecard Perspective. *International Journal of Finance and Accounting*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/10.5923/j.ijfa.20120102.01>
- Messinger, L. (2006). Social Welfare Policy and Advocacy. In *Sexual orientation & gender expression in social work practice: Working with gay, lesbian, bisexual, & transgender people*. (pp. 427–459). <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=psyc5&NEWS=N&AN=2006-02520-019>
- Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods Sourcebook (3rd Edition). In *SAGE Publications, Inc.* <https://doi.org/10.1177/239700221402800402>
- Molenaers, N. (2012). The great divide? Donor perceptions of budget support, eligibility and policy dialogue. *Third World Quarterly*, 33(5). <https://doi.org/10.1080/01436597.2012.677311>
- Molenaers, N., Cepinskas, L., & Jacobs, B. (2010). Budget support and policy / political dialogue Donor practices in handling (political) crises Nadia Molenaers. *IOB Discussion Paper Nr. 6*.
- Rochefort, D. A. (2019). American Social Welfare Policy. In *American Social Welfare Policy*. <https://doi.org/10.4324/9780429036583>
- Rubinstein, A. (2020). Modeling Bounded Rationality in Games. In *Modeling Bounded Rationality*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/4702.003.0010>
- Secchi, D. (2010). Extendable Rationality: Understanding Decision Making in Organizations. In *Media*.
- Sharma, U., & Frost, D. (2020). Social capital and the budgeting process: a study of three organisations. *Accounting Forum*, 44(4). <https://doi.org/10.1080/01559982.2020.1777637>
-

- Simon, H. A. (1997). *Models of Bounded Rationality*. In *Models of Bounded Rationality*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/4711.001.0001>
- Slavinskaite, N., Novotny, M., & Gedvilaite, D. (2020). Evaluation of the fiscal decentralization: Case studies of european union. *Engineering Economics*, 31(1). <https://doi.org/10.5755/j01.ee.31.1.23065>
- Smith, K. B., & Larimer, C. W. (2018). *The Public Policy Theory Primer* (3rd Editio). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429494352>
- Stewart, J., Hedge, D. M., & Lester, J. P. (2008). Public Policy: An Evolutionary Approach. In *Public Policy: An Evolutionary Approach*.
- Stojcic, N., & Tolic, M. S. (2019). Direct and indirect effects of fiscal decentralization on economic growth. *Ekonomicky Casopis*, 67(3).
- Stout, M. (2011). In Search of a Holistic Public Policy Theory Primer. *Public Administration Review*, 71(2), 322–326. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02350.x>
- Thomas. (2013). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Sebangang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Ejurnal Pemerintahan Integratif*, 1(1).
- Tropman, J. E., DeNitto, D., & Dyie, T. R. (1983). Social Welfare: Politics and Public Policy. *Journal of Policy Analysis and Management*, 2(4), 661. <https://doi.org/10.2307/3323637>
- Velupillai, K. V. (2017). Models of Simon. In *Models of Simon*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203462447>
- Weible, C. M., Sabatier, P. A., Baumgartner, F. R., Jones, B. D., & Mortensen, P. B. (2018). Punctuated Equilibrium Theory: Explaining Stability and Change in Public Policymaking. In *Theories of the Policy Process* (pp. 55–101). <https://doi.org/10.4324/9780429494284-3>
- Williamson, K., Given, L. M., & Scifleet, P. (2017). Qualitative data analysis. In *Research Methods: Information, Systems, and Contexts: Second Edition* (pp. 453–476). <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102220-7.00019-4>
- Wolff, S. (2015). Eu budget support as a transnational policy instrument: Above and beyond the state? *Public Administration*, 93(4). <https://doi.org/10.1111/padm.12177>